

Judul : Milenial Ogah ke Sawah Duh, Profesi Petani Terancam Punah
Tanggal : Kamis, 29 September 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Milenial Ogah Ke Sawah Duh, Profesi Petani Terancam Punah

ANGGOTA Komisi IV DPR Slamet meminta Pemerintah menggenjot kesejahteraan petani. Langkah ini penting, mengingat profesi petani sudah tidak menjanjikan, tidak diminati generasi milenial. Alhasil, profesi petani akan hilang di masa mendatang.

Slamet bilang, ketidakpastian global saat ini telah mengerek harga pangan dunia. Tidak ada pilihan lain, Pemerintah harus jeli mengelola pangan nasional agar mampu menciptakan sistem kedaulatan pangan secara utuh.

Sementara, masih banyak pekerjaan besar yang harus diatasi Pemerintah. Mulai dari kesejahteraan petani, penurunan kualitas dan kuantitas pertanian nasional hingga alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat.

"Tidak heran, menurut Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) jumlah petani Indonesia terus menurun. Bahkan diprediksi profesi ini akan lenyap pada 2065," jelas politisi Fraksi PKS ini, saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Situasi ini, lanjut dia, diperparah dengan minimnya generasi millennial yang terjun ke bidang pertanian, sehingga mengancam regenerasi petani Indonesia.

Presiden Jokowi mesti membuat kebijakan terbaik, sehingga dapat dikenang sebagai Bapak Petani Indonesia.

Slamet berharap, petani bisa naik kelas dan banyak generasi muda masuk ke pertanian.

"Kami meminta Pemerintah fokus pada peningkatan kese-

jahteraan petani, bukan sekadar mengejar peningkatan produksi," tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah kudu menghentikan kegiatan-kegiatan yang menyedot anggaran besar, tapi tidak berkorelasi positif terhadap peningkatan kedaulatan pangan nasional.

"Termasuk mengevaluasi kegiatan Food Estate yang disinyalir sudah mengalami kegagalan," tegas politisi daerah pemilihan Jawa Barat IV ini.

Kabupaten dan Kota Sukabumi ini meminta Pemerintah melakukan transformasi subsidi pertanian yang sebelumnya berbasis pada input menjadi berbasis pada subsidi harga.

"Evaluasi dampak Undang-Undang Cipta kerja khususnya sektor pertanian, berupa kemudahan impor komoditas pertanian dengan dalil menjaga ketersediaan pangan dalam negeri. Padahal praktik tersebut merugikan pertanian nasional," pungkasnya.

Terpisah, Direktur Jenderal Food and Organization (FAO) Qu Dongyu memberikan selamat atas keberhasilan Indonesia dalam mengatasi potensi krisis pangan global. Di saat dunia dihadapkan pada tantangan yang berat, Indonesia berhasil menghadapinya.

"Upaya yang dilakukan dalam penyediaan pangan tidaklah mudah. Mengingat kita menghadapi pandemi Covid-19 juga tantangan perubahan iklim. Tapi, sekarang kalian punya stok beras yang cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia," sebut Qu, saat konferensi pers usai *one on one meeting* dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di Bali, kemarin. ■ KAL